

## Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewi Lusiana<sup>1)</sup>, Anis Sulistiyan<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah, <sup>2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1)</sup> [dewilusiana.dl17@gmail.com](mailto:dewilusiana.dl17@gmail.com), <sup>2)</sup> [anissuliss12@gmail.com](mailto:anissuliss12@gmail.com)

**Abstrak.** Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang di dunia. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2023), angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada 2020, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat persentase tertinggi. Faktor-faktor seperti IPM, upah minimum, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, serta zakat turut memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan zakat terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017–2024. Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan model regresi linier berganda melalui perangkat lunak EViews 10. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa IPM dan zakat berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan upah minimum tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk dan pengangguran terbukti memperburuk tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

**Kata kunci:** Kemiskinan, IPM, Upah Minimum, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Zakat.

**Abstract.** Poverty remains a strategic issue facing many developing countries worldwide. This situation can hamper economic development and reduce public welfare. According to a report by the Central Statistics Agency (2023), the poverty rate in Indonesia fluctuates from year to year. In 2020, Java Island was the region with the largest number of poor people, with the Special Region of Yogyakarta recording the highest percentage. Factors such as the Human Development Index (HDI), minimum wage, population, unemployment rate, and zakat (alms) also influence poverty levels in the region. This study aims to estimate the effect of the Human Development Index (HDI), minimum wage, population, unemployment rate, and zakat on poverty in the Special Region of Yogyakarta during the period 2017–2024. The analysis was conducted using a descriptive quantitative approach using a multiple linear regression model through EViews 10 software. Based on the analysis results, it is known that the HDI and zakat contribute to reducing the poverty rate, while the minimum wage does not have a significant effect. Meanwhile, increasing population and unemployment have been shown to worsen the poverty rate in the region.

**Keywords:** Poverty, Human Development Index, Minimum Wage, Population, Unemployment, Zakat.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan juga menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh setiap negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan ekonomi hingga akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat, maka setiap provinsi di suatu negara perlu memperhatikan tingginya angka kemiskinan. Meskipun masalah kemiskinan tidak pernah hilang tetapi setidaknya pemerintah dapat menekan jumlah yang ada.

Sesuai data yang didapatkan dari BPS (2023), tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuatif. Tahun 2020, Badan Pusat Statistik menyatakan jika sebagian dari penduduk Pulau Jawa terkategori miskin. Di mana persentase angka kemiskinan paling banyak ada di pulau Jawa, terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi yang dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata ternyata menjadi kota termiskin di Pulau Jawa dengan persentase sebesar 10.83% pada Maret 2024 atau setara dengan 445.550 ribu penduduk miskin yang ada. Hal tersebut didukung oleh data kemiskinan pada Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2017-2024.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Miskin  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Ribu Jiwa)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
D.I. Yogyakarta	488.53	460.10	448.47	475.72	506.45	454.76	448.47	445.55
Kulon Progo	84.17	77.72	74.62	78.06	81.14	73.21	70.74	71.48
Bantul	139.67	134.84	131.15	138.66	146.98	130.13	128.51	126.93
Gunung Kidul	135.74	125.76	123.08	127.61	135.33	122.82	122.54	120.41
Sleman	96.75	92.04	90.17	99.78	108.93	98.92	97.50	97.94
Kota Yogyakarta	32.20	29.75	29.45	31.62	34.07	29.68	29.48	28.79

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas, angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 adalah 488,53 ribu jiwa. Angka tersebut kemudian turun menjadi 460,10 ribu jiwa pada tahun 2018, dan kembali turun menjadi 448,47 ribu jiwa pada tahun 2019. Namun, dua tahun kemudian, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 475,72 ribu jiwa pada tahun 2020 dan 506,45 ribu jiwa pada tahun 2021. Lonjakan ini hanya berlangsung singkat, karena jumlah penduduk miskin turun menjadi 454,76 ribu jiwa pada tahun 2022, 448,47 ribu jiwa pada tahun 2023, dan 445,55 ribu jiwa pada tahun 2024.

Meskipun pada beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah penduduk miskin memang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun secara proporsional, angka tersebut masih lebih

tinggi dibandingkan pada wilayah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengetahui hal ini, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap tingginya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Indikator-indikator tersebut meliputi indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten/kota, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas dan tingkat kesejahteraan manusia dalam suatu negara atau wilayah. Meningkatkan indeks pembangunan manusia mengindikasikan bahwa meningkatnya produktivitas manusia. Hal ini karena IPM mencerminkan semakin baiknya kualitas SDM yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang akan berpengaruh pada kemampuan kerja yang lebih tinggi sehingga bertambahnya produktivitas. Meningkatnya produktivitas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan kemiskinan. Sejalan dengan riset Tarida et al. menyatakan IPM berdampak negatif signifikan terhadap kemiskinan, yang mengartikan meningkatnya IPM dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.<sup>1</sup> Sedangkan hasil penelitian Rivana & Gani menyatakan sebaliknya.<sup>2</sup>

Pemerintah menetapkan upah minimum sebagai standar upah terendah yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi tenaga kerja untuk melindungi hak pekerja agar mendapatkan penghasilan yang layak. Upah minimum adalah batas bawah nilai upah yang dibayarkan pengusaha kepada tenaga kerja.<sup>3</sup> Upah minimum yang dibayarkan oleh pengusaha dapat menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga akhirnya menurunkan angka kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini didukung oleh temuan Ammaliah & Suherty menyatakan terdapat korelasi negatif signifikan terhadap kemiskinan.<sup>4</sup> Namun

---

<sup>1</sup> Ade Kamlatu Tarida et al., "Pengaruh IPM Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dengan ZIS Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Sosial (EMBISS)* 4, no. 4 (2024): 511–522.

<sup>2</sup> Melda Rivana and Irwan Gani, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Serta Upah Minimum Terhadap Kemiskinan," *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 20, no. 1 (2024): 51–60.

<sup>3</sup> Indah Tri Utami and Mohammad Rofiuddin, "Analisis Pengaruh Upah Minimum, Belanja Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi Mayoritas Muslim," *Journal of Economics Research and Policy Studies* 2, no. 3 (2022): 145–160.

<sup>4</sup> Nurul Ammaliah and Lina Suherty, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 7, no. 1 (2024): 81–92.

penelitian Rahmawati et al. menyatakan upah minimum yang rendah justru meningkatkan angka kemiskinan.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan BPS (2022), yang dimaksud dengan penduduk ialah setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia setidaknya selama satu tahun, atau kurang dari satu tahun namun memiliki niat untuk menetap. Adapun jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 3.970,22 ribu jiwa. kini naik menjadi 4.126.44 jiwa di tahun 2024. Meningkatnya jumlah penduduk yang berimbang dengan baiknya kualitas penduduk serta peningkatan sumber daya pangan akan berdampak pada peningkatan kemiskinan.<sup>6</sup> Hal ini didukung oleh temuan Sari mengatakan ketika jumlah penduduk memiliki keterkaitan yang positif signifikan pada kemiskinan.<sup>7</sup> Tetapi temuan Ristika et al. menyatakan sebaliknya.<sup>8</sup>

Pengangguran diartikan sebagai orang yang mencari kerja tetapi belum memperolehnya. Pengangguran juga dimaknai sebagai masalah sosial ekonomi. Masyarakat yang menganggur tentu tidak memperoleh pendapatan, apabila dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan. Maka saat jumlah pengangguran meningkat hal ini akan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena mereka tidak memperoleh penghasilan. Menurunnya kesejahteraan tersebut menyebabkan mereka terjebak dalam masalah kemiskinan. Hal ini yang menyebabkan angka pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan di suatu wilayah. Menurut hasil penelitian Rahmawati et al. menyatakan pengangguran berdampak signifikan terhadap kemiskinan.<sup>9</sup> Namun temuan Ristika et al. menyatakan sebaliknya.<sup>10</sup>

Selanjutnya, zakat ialah rukun Islam ketiga yang juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual social, ekonomi dan moral. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa zakat ialah

---

<sup>5</sup> Novia Rahmawati, Panji Kusuma Prasetyanto, and Fitrah Sari Islami, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)," *CONVERGENCE: The Journal of Economic Development* 4, no. 1 (2022): 19-31.

<sup>6</sup> Emilia Titah Nabibah and Nurul Hanifa, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Independent: Journal of Economics* 2, no. 3 (2022): 1-13.

<sup>7</sup> Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibrium* 10, no. 2 (2021): 121-130.

<sup>8</sup> Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, and Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 12, no. November (2021): 129-136.

<sup>9</sup> Rahmawati, Prasetyanto, and Islami.

<sup>10</sup> Ristika, Primandhana, and Wahed.

kewajiban yang harus dikeluarkan yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta maupun diri seseorang. Adanya distribusi zakat, infak, shodaqoh dan sejenisnya dapat memperkuat tali kasih antara orang kaya dan miskin. Meningkatnya zakat secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan hingga mengurangi kemiskinan di suatu wilayah. Hasil penelitian Baihaqi & Puspitasari menyatakan zakat berdampak negatif signifikan terhadap kemiskinan.<sup>11</sup> Namun Martaliah et al. menyatakan tidak terdapat korelasi signifikan antara keduanya.<sup>12</sup>

Menyadari adanya kontradiksi dalam temuan penelitian sebelumnya, penulis ingin mengkaji ulang faktor-faktor penentu kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan, Namun penelitian kemiskinan dengan menambahkan variabel zakat sebagai variabel independen masih sangat jarang dilakukan, sehingga menjadi nilai kebaruan dalam penelitian ini.

Tujuan riset ini untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum, jumlah penduduk, pengangguran dan distribusi zakat terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2024.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari BPS dan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017–2024. Penelitian ini terdiri atas enam variabel, mencakup satu Dalam penelitian ini, kemiskinan berperan sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas mencakup Indeks Pembangunan Manusia, upah minimum, jumlah penduduk, pengangguran, dan zakat.

Metode regresi linier berganda diterapkan guna mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, analisis ini juga mencakup pengujian asumsi klasik seperti

---

<sup>11</sup> Ahmad Briezy Baihaqi and Maria Puspitasari, "Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Journal Publichuo* 3, no. 2 (2020): 177–192.

<sup>12</sup> Nurfitri Martaliah et al., "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Dan IPM Terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2021," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 2 (2023): 334–344.

uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.<sup>13</sup> Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Y merupakan representasi dari kemiskinan,  $\alpha$  dan  $\beta$  merupakan koefisien regresi,  $X_1$  merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),  $X_2$  merupakan Upah Minimum (UM),  $X_3$  merupakan jumlah penduduk,  $X_4$  merupakan tingkat pengangguran, dan  $e$  adalah error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Statistik Deskriptif

Merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menganalisis suatu data. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data dalam penelitian.

**Tabel. 2**  
Hasil Statistik Descriptif

	KEMISKINAN	IPM	UM	TP	JP	ZAKAT
Mean	466.0063	80.24250	19717771	3.520625	3945834.	2.28E+08
Median	457.4300	80.10500	1802958.	3.375000	3944709.	1.55E+08
Maximum	506.4500	81.62000	1.45E+08	4.570000	4126444.	5.95E+08
Minimum	445.5500	78.89000	1337645.	2.840000	3768235.	64134467
Std. Dev.	21.04445	0.824508	48269978	0.567467	119072.8	1.98E+08
Obs.	32	32	32	32	32	32

Sumber: Output Eviews (2025, data diolah)

Sesuai dengan tabel 2. dijelaskan ketika total data setiap variabel adalah 32, jumlah tersebut didapatkan dari data kuartal dari masa penelitian yaitu sejak tahun 2017-2024. Variabel kemiskinan memiliki nilai maksimum 506.4500, minimum 445.5500. Nilai mean 466.0063, median 457.4300 dengan standar deviasi 21.04445. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari maksimum dan kurang dari minimum, maka data dinyatakan tidak outlier.

Variabel IPM memiliki nilai maksimum 81.62000, minimum 78.89000. Nilai mean 80.24250, median 80.10500 dengan standar deviasi 0.824508. Dari hasil

<sup>13</sup> Agus Widarjono, *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasi Disertasi Panduan Eviews*, Kelima. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018).

tersebut diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari maksimum dan kurang dari minimum, maka data dinyatakan tidak outlier.

Variabel Upah Minimum memiliki nilai maksimum 1.45E+08, minimum 1337645. Nilai mean 1971777, median 1802958 dengan standar deviasi 48269978. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari maksimum dan kurang dari minimum, maka data dinyatakan tidak outlier.

Variabel tingkat pengangguran memiliki nilai maksimum 4.570000, minimum 2.840000. Nilai mean 3.520625, median 3.375000 dengan standar deviasi 0.567467. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari maksimum dan kurang dari minimum, maka data dinyatakan tidak outlier.

Variabel jumlah penduduk memiliki nilai maksimum 4126444, minimum 3768235. Nilai mean 3945834, median 3944709 dengan standar deviasi 119072.8. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari maksimum dan kurang dari minimum, maka data dinyatakan tidak outlier.

Variabel zakat memiliki nilai maksimum 5.95E+08, minimum 64134467. Nilai mean 2.28E+08, median 1.55E+08 dengan standar deviasi 1.98E+08. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai mean tidak lebih dari maksimum dan kurang dari minimum, maka data dinyatakan tidak outlier.

### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

Pada uji ini sangat diperlukan karena uji asumsi klasik sebagai langkah verifikasi terhadap kelayakan model. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa model regresi menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) mampu menghasilkan estimasi efisien, bebas bias, dan konsisten. Uji ini meliputi empat aspek utama, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.<sup>14</sup>

### **Uji Normalitas**

Tahap ini penting dalam analisis statistik yang menentukan apakah data dalam suatu studi mengikuti pola distribusi normal. Uji ini digunakan untuk memeriksa

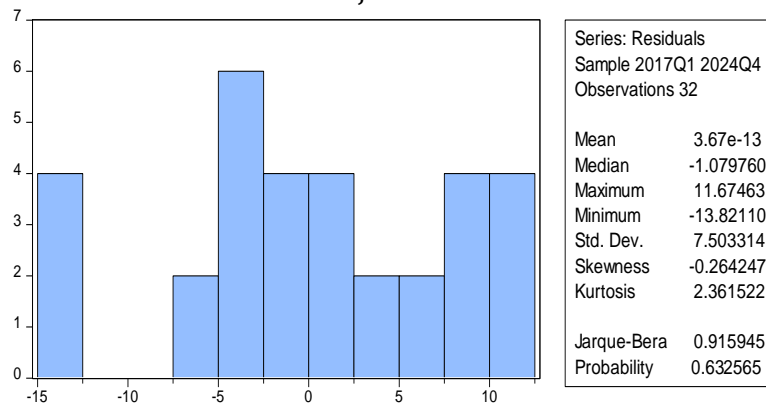
---

<sup>14</sup> Ibid.



apakah model regresi menghasilkan hasil yang akurat dan tidak bias. Data dianggap normal jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05.

**Gambar 1.**  
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews (2025, data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, nilai Prob. Jarque-Bera sebesar 0,915945 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data lolos uji normalitas.

### Uji Multikolinieritas

Pada analisis regresi, pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menilai sejauh mana variabel bebas saling berkorelasi secara linear. Hasil pengujian didasarkan pada nilai VIF, di mana nilai kurang dari 10 menunjukkan bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas.

**Tabel 3.**  
Hasil Uji Multikolinieritas

	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	1.822500	1.456215	NA
IPM	156.8882	5.479714	4.507526
UM	1.14E-15	1.222338	1.222337
PENGANGGURAN	19.49697	1.615539	1.612945
JUMLAH PENDUDUK	1.13E-08	5.328221	4.125419
ZAKAT	4.61E-17	1.027148	1.027092

Sumber: Output Eviews (2025, data diolah)

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai VIF kurang dari 10, maka data dinyatakan lulus uji multikolinieritas.



### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai ada tidaknya ketidaksamaan varians residual pada model regresi yang digunakan. Pengujian ini biasanya menggunakan metode *White Test*. Jika nilai probabilitas chi-kuadrat melebihi 0,05, maka data dinyatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.<sup>15</sup>

**Tabel 4.**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-squared	7.677546	Prob. Chi-Square	0.1749
---------------	----------	------------------	--------

Sumber: Output Eviews (2025, data diolah)

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4, ketika nilai probabilitas Chi-Square melebihi 0,05, hal ini menandakan bahwa varians residual bersifat tetap. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Dalam model regresi linier, pengujian pengujian tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat keterkaitan antara residu pada periode berjalan dengan residu pada periode sebelumnya. Adanya hubungan tersebut menandakan bahwa model mengalami autokorelasi.<sup>16</sup>

**Tabel 5.**  
Hasil Uji Autokorelasi

Obs*R-squared	0.016284	Prob. Chi-Square	0.9919
---------------	----------	------------------	--------

Sumber: Output Eviews (2025, data diolah)

Mengacu pada Tabel 5, hasil yang menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square di atas 0,05 menandakan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. sehingga data dinyatakan memenuhi asumsi uji autokorelasi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian yang mencakup beberapa variabel bebas, analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

Metode regresi digunakan untuk menilai apakah variabel bebas memiliki dampak yang berarti terhadap variabel terikat yang menjadi objek kajian.<sup>17</sup> Analisis ini terdiri dari t-statistik, f-statistik serta koefisien determinasi.

### Uji T Statistik

Uji ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika nilai probabilitas hasil perhitungan berada di bawah 0,05, hal tersebut menunjukkan ketika variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen.<sup>18</sup>

**Tabel 6.**

Hasil Uji T - Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4766.291	653.3583	7.295064	0.0000
IPM	-73.32470	12.52132	-5.855989	0.0000
UM	-3.80E-08	3.72E-08	-1.020816	0.3167
PENGANGGURAN	15.01803	3.635770	4.130633	0.0003
JUMLAH PENDUDUK	0.000390	9.26E-05	4.216832	0.0003
ZAKAT	-4.08E-08	7.85E-09	-5.201863	0.0000

Sumber: Output Eviews (2025, data diolah)

Berdasarkan tabel 6, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil pengujian parsial memperlihatkan bahwa variabel IPM memiliki nilai *t-statistic* sebesar -5,855989 dengan nilai probabilitas 0,0000. Hal ini mengonfirmasi adanya pengaruh negatif yang signifikan antara IPM terhadap kemiskinan, di mana peningkatan IPM secara statistik mampu menekan tingkat kemiskinan.
2. Variabel Upah Minimum (UM) menunjukkan nilai *t-statistic* -1.020816 dan probabilitas 0.3167, yang berarti pengaruhnya terhadap kemiskinan tidak signifikan secara statistik.
3. Kemudian, variabel Pengangguran memiliki nilai *t-statistic* 4.130633 dengan probabilitas 0.0003. Hasil pengujian mengindikasikan adanya hubungan positif yang signifikan antara pengangguran dan kemiskinan, menandakan bahwa

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

kenaikan tingkat pengangguran berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan di suatu wilayah.

4. Variabel Selain itu, variabel Jumlah Penduduk juga menunjukkan nilai *t-statistic* 4.216832 dengan probabilitas 0.0003, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertambahan jumlah penduduk berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
5. Dari hasil analisis parsial diketahui bahwa variabel zakat memiliki nilai *t-statistik* sebesar -5,201863 dengan nilai probabilitas 0,0000. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat berperan secara signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan penyaluran zakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara nyata.

#### Uji F Statistik

Uji ini dirancang untuk menilai apakah seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat pada saat yang bersamaan. Kriteria pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan nilai probabilitas *F-statistic*, di mana pengaruh dianggap signifikan jika nilai tersebut berada di bawah 0,05.

**Tabel 7.**

Hasil Uji F-Statistik

F-statistic	35.70460
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output Eviews (2025, data diolah)

Tabel 7 memperlihatkan bahwa seluruh secara kolektif, variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

#### Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh proporsional variabel independen terhadap variabel dependen, yang ditunjukkan melalui nilai Adjusted R-square hasil analisis.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid.

**Tabel 8.**

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.872875
Adjusted R-squared	0.848428

Sumber: Output Eviews (2025, data diolah)

Seperti terlihat pada tabel 8, nilai Adjusted R-square mencapai 0,848428. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian mampu menjelaskan sebesar 84% perubahan pada variabel dependen, sedangkan sisanya, yaitu 16%, dipengaruhi oleh faktor di luar model analisis.

## Pembahasan

### Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai koefisien sebesar -73.32470 dengan *t-statistic* -5.855989 dan tingkat signifikansi 0.0000. Peningkatan IPM sebesar 1% berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan sebesar 73.324,70. Artinya, IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2017 hingga 2024.<sup>20</sup> Hasil ini mendukung temuan Sukron dan Yasin yang menyatakan adanya hubungan negatif antara IPM dan kemiskinan, namun berbeda dengan hasil penelitian Rivana dan Gani yang menunjukkan adanya hubungan positif di wilayah Kalimantan Timur.<sup>21</sup>

Pembangunan manusia merupakan upaya menciptakan pembangunan bagi sektor lain. Peningkatan IPM menunjukkan peningkatan produktivitas manusia. IPM merefleksikan peningkatan kualitas SDM, Aspek pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Ketika kualitas SDM meningkat, tenaga kerja yang dihasilkan pun menjadi lebih produktif. Produktivitas yang tinggi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat kemiskinan.

---

<sup>20</sup> Ikhsanudin Sukron and Ach Yasin, "Pengaruh Ipm, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah," *INDEPENDENT: Journal of Economics* 1, no. 3 (2021): 47–65.

<sup>21</sup> Rivana and Gani.

### **Pengaruh Upah Minimum (UM) Terhadap Kemiskinan**

Dari hasil analisis diperoleh nilai t-statistik sebesar -1,020816 dan nilai probabilitas 0,3167. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2017–2024. Hasil ini mendukung temuan Utami dan Rofiuddin yang juga menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara upah minimum dan kemiskinan.<sup>22</sup> Namun berlawanan dengan penelitian Mauludi dkk. yang menemukan pengaruh positif yang signifikan antara keduanya.<sup>23</sup>

Upah minimum dirapkan pemerintah sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan menjamin pekerja memperoleh pendapatan yang layak. Kenaikan upah minimum dinilai mampu memberikan dorongan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum. Namun peningkatan ini belum tentu menggambarkan kesejahteraan seseorang, atau sederhananya seseorang yang memperoleh upah tinggi belum tentu disebut sebagai orang yang berkecukupan. Karena kebutuhan seseorang sangatlah banyak atau lebih besar dari upah yang diperoleh sehingga adanya upah minimum belum bisa menyejahterakan seseorang. Selain itu, adanya faktor inflasi menyebabkan tingkat harga barang dan jasa meningkat sehingga mengakibatkan standar kehidupan layak juga terus meningkat. Jika kita hubungkan antara upah minimum dengan faktor sosial ini, meningkatnya upah minimum tidak terasa dampaknya akibat adanya inflasi.<sup>24</sup> Sehingga hal ini yang menyebabkan upah minimum tidak berpengaruh signifikan pada kemiskinan.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil studi, kami memperoleh nilai koefisien sebesar 0,000390, t-statistik sebesar 4,216832, dan probabilitas sebesar 0,0003. Temuan ini menunjukkan

---

<sup>22</sup> Utami and Rofiuddin.

<sup>23</sup> Ali Mauludi, Fadllan, and Fitri Nur Rahmawati, "Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2023): 68–83.

<sup>24</sup> Rivana and Gani.

bahwa jika variabel populasi bertambah satu persen, kemiskinan akan meningkat sebesar 0,000390. Statistik ini menunjukkan bahwa populasi memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2024. Temuan ini diperkuat oleh Lendentariang dkk., yang menyatakan bahwa populasi memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kemiskinan.<sup>25</sup> Selanjutnya ekspansi penduduk dapat memperburuk kemiskinan selama periode penelitian. Namun, kesimpulan ini bertentangan dengan teori Ristika dkk. yang menyatakan bahwa ekspansi penduduk memiliki dampak negatif yang besar, sehingga mengurangi kemiskinan.<sup>26</sup>

Penduduk diartikan sebagai seluruh orang yang berdomisili di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi bagi daerah tersebut. Jika peningkatan populasi tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas manusia serta penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, maka kemiskinan cenderung mengalami peningkatan. Penelitian ini mendukung hasil studi Sari yang meneliti hubungan antara upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitiannya, peningkatan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan dan sekaligus menghambat perkembangan ekonomi daerah.<sup>27</sup>

### **Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien sebesar 15.01803, t-statistik 4.130633, dan probabilitas 0.0003. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa ketika tingkat pengangguran naik satu persen, kemiskinan akan naik sebesar 15,01803%. Dengan demikian, variabel pengangguran terbukti memiliki dampak yang signifikan pada kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun 2017 dan 2024. Hasil ini

---

<sup>25</sup> Deysy Lendentariang, Daisy S.M. Engka, and Krest D. Tolosang, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sangihe," *Jurnal Bekal Ilmiah Efisiensi* 19, no. 2 (2019): 23-34.

<sup>26</sup> Ristika, Primandhana, and Wahed.

<sup>27</sup> Sari.

mendukung penelitian Nabibah dan Hanifa yang menemukan bahwa peningkatan pengangguran berdampak langsung pada naiknya tingkat kemiskinan.<sup>28</sup> Sebaliknya, temuan ini tidak konsisten dengan penelitian Baihaqi dan Puspitasari yang berargumen bahwa peningkatan pengangguran dapat menurunkan kemiskinan. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh penggunaan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang mengukur jumlah individu yang belum bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau menunggu untuk mulai bekerja, bukan jumlah penduduk miskin.<sup>29</sup>

Terdapat korelasi yang kuat sekali antara pengangguran dengan kemiskinan. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau bekerja paruh waktu termasuk dalam kategori orang miskin. Sementara orang yang bekerja dengan gaji tetap masuk dalam kategori orang kaya. Tingginya angka pengangguran beberapa tahun terakhir disebabkan munculnya pandemi covid-19 yang membuat gempar masyarakat seluruh negara termasuk Indonesia. Akibat adanya wabah pandemi ini kegiatan ekonomi terhambat, perusahaan tidak bisa memperoleh keuntungan secara maksimal, membuat suatu perusahaan tidak bisa mengaji karyawan, sehingga terjadilah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara besar-besaran.<sup>30</sup> Dampak buruk dari PHK adalah meningkatnya angka pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat hingga akhirnya mengurangi kemakmuran seseorang. Ketika terjadinya peningkatan pada masyarakat yang menganggur maka semakin banyak pula masyarakat yang terjatuh dalam lingkaran kemiskinan karena mereka tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>31</sup>

### **Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien sebesar -4,08E-08, t-statistik sebesar -5,201863, dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Temuan ini mengindikasikan

---

<sup>28</sup> Nabibah and Hanifa.

<sup>29</sup> Baihaqi and Puspitasari.

<sup>30</sup> Nabibah and Hanifa.

<sup>31</sup> Rahmawati, Prasetyanto, and Islami.



bahwa peningkatan zakat sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar  $-4,08E-08$ . Oleh karena itu, variabel zakat terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017–2022. Temuan ini konsisten dengan penelitian Putri dkk., yang menyimpulkan bahwa penyaluran zakat yang baik dapat menekan kemiskinan.<sup>32</sup> Namun berlawanan dengan hasil Martaliah dkk. yang menilai bahwa zakat tidak berpengaruh nyata terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi.<sup>33</sup>

Zakat adalah salah satu alternatif dalam membantu menurunkan angka kemiskinan. Zakat terdiri dari zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif ialah distribusi dana zakat yang dikasihkan pada masyarakat dalam bentuk bahan pokok makanan. Sementara zakat produktif adalah distribusi zakat kepada masyarakat (mustahik) berupa modal, peralatan usaha serta pemberdayaan atau pelatihan kepada penerimanya sehingga masyarakat dapat memperbaiki taraf kehidupannya melalui usaha yang dijalankan. Dengan adanya distribusi zakat, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Temuan ini mengonfirmasi temuan Johari et al. yang menyatakan bahwa distribusi zakat dapat meningkatkan pendapatan bulanan dan harian bagi setiap individu yang menerima zakat.<sup>34</sup> Sehingga hal ini yang menjadikan variabel zakat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan serta turut berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah tertentu.

---

<sup>32</sup> Dwi Yunila Putri, Rayna Kartika, and Riyadi Aprayuda, "Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan?: Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 248–261.

<sup>33</sup> Martaliah et al., "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Dan IPM Terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2021."

<sup>34</sup> Fuadah Johari et al., "The Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality among New Convert (Muallaf) in Selangor, Malaysia," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 1, no. 3 (2014): 43–56.

## **Kesimpulan**

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan zakat memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kemiskinan. Sebaliknya, upah minimum tidak memberikan dampak yang berarti. Namun demikian, variabel pengangguran dan jumlah penduduk berpengaruh positif cukup kuat pada kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **Saran**

Berdasarkan hasil diatas diperoleh pada penelitian ini maka Pemerintah perlu meningkatkan IPM, memanfaatkan zakat secara optimal, mengelola upah minimum secara tepat, mengendalikan jumlah penduduk, dan penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan kemiskinan di DIY akan menurun secara signifikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ammaliah, Nurul, and Lina Suherty. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 7, no. 1 (2024): 81–92.
- Baihaqi, Ahmad Briezy, and Maria Puspitasari. "Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh." *Journal Publicuho* 3, no. 2 (2020): 177–192.
- Johari, Fuadah, Muhammad Ridhwan, Ab Aziz, Ahmad Fahme, and Mohd Ali. "The Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality among New Convert (Muallaf) in Selangor, Malaysia." *Online Journal of Research in Islamic Studies* 1, no. 3 (2014): 43–56.
- Lendentariang, Deysy, Daisy S.M. Engka, and Krest D. Tolosang. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sangihe." *Jurnal Bekalallmiah Efisiensi* 19, no. 2 (2019): 23–34.
- Martaliah, Nurfitri, Efni Anita, Fuad Rahman, and Naufal Luthfi Ramli. "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Dan IPM Terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2021." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 2 (2023): 334–344.
- Mauludi, Ali, Fadllan, and Fitri Nur Rahmawati. "Pengaruh Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2023): 68–83.
- Nabibah, Emilia Titah, and Nurul Hanifa. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Independent: Journal of Economics* 2, no. 3 (2022): 1–13.
- Putri, Dwi Yunila, Rayna Kartika, and Riyadi Aprayuda. "Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan?: Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 248–261.
- Rahmawati, Novia, Panji Kusuma Prasetyanto, and Fitrah Sari Islami. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)." *CONVERGENCE: The Journal of Economic Development* 4, no. 1 (2022): 19–31.
- Ristika, Ema Dian, Wiwin Priana Primandhana, and Mohammad Wahed. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 12, no. November (2021): 129–136.

- Rivana, Melda, and Irwan Gani. "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Serta Upah Minimum Terhadap Kemiskinan." *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 20, no. 1 (2024): 51–60.
- Sari, Yulia Adella. "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah." *Equilibrium* 10, no. 2 (2021): 121–130.
- Sukron, Ikhsanudin, and Ach Yasin. "Pengaruh Ipm, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah." *INDEPENDENT: Journal Of Economics* 1, no. 3 (2021): 47–65.
- Tarida, Ade Kamilatu, Bayu Nurhadi, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. "Pengaruh IPM Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dengan ZIS Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Sosial (EMBISS)* 4, no. 4 (2024): 511–522.
- Utami, Indah Tri, and Mohammad Rofiuddin. "Analisis Pengaruh Upah Minimum, Belanja Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Provinsi Mayoritas Muslim." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 2, no. 3 (2022): 145–160.
- Widarjono, Agus. *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasi Disertasi Panduan Eviews*. Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.